

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan total wilayah 5.193.250 Km² yang mencakup luas daratan dan luas lautan. Indonesia juga memiliki kepadatan jumlah penduduk yang sangat besar dan penduduk tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 252.164,8 ribu orang yang terdiri dari 125.715,2 Laki-laki dan 125.449,6 Perempuan. Permasalahan yang terjadi di Negara Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 252.164,8 ribu orang adalah tidak sebandingnya keberadaan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat besar mengakibatkan persebaran penduduk yang tidak merata di wilayah Indonesia. Faktor keberadaan lapangan pekerjaan sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan merupakan bagian dari aktivitas yang sangat penting agar dapat memperoleh sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat.

Pengertian atau pemaknaan bahwa pekerjaan sangat penting bagi masyarakat terceminkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹ Pada dasarnya Negara Indonesia berhak menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan penghidupan yang layak dengan cara memperoleh pekerjaan yang layak pula. Dengan keberadaan Pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan untuk dapat menjadikan masyarakatnya hidup makmur dan sejahtera melalui berbagai kebijakan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakatnya. Pada kenyataannya di Indonesia kebutuhan masyarakat atas pekerjaan sangat tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di Dalam Negeri sehingga memunculkan persaingan dalam mendapatkan pekerjaan yang semakin ketat.

Berdasarkan hal tersebut salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia adalah melakukan pembinaan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tersebut yang melakukan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri merupakan Program Nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat 2

peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan pembangunan di sektor ketenagakerjaan di Indonesia.

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan Program Nasional Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja ke Luar Negeri merupakan alternatif kebijakan yang direncanakan Pemerintah Republik Indonesia dan bagian dari komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka penempatan dan perlindungan yang layak, cepat, mudah, murah dan efisien kepada Warga Negeranya yang akan bekerja ke Luar Negeri melalui salah satu program berbasis teknologi informasi yang terpadu pada Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (SISKOTKLN) sehingga dapat menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan pembangunan di sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2012 menerapkan program pelayanan pada Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (SISKOTKLN) untuk mempermudah pendataan, pembinaan, pelatihan, perlindungan, penempatan dan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri.

Sebelum berlakukannya program pelayanan pendataan, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berbasis sistem, dalam

pelaksanaannya programnya masih berjalan secara manual atau melakukan pendataan dalam bentuk administrasi tertulis dan bentuk pembukuan dari data Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang akan bekerja ke Luar Negeri sehingga proses pelayanan secara manual masih cenderung mempersulit koordinasi pendataan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pendaftaran bagi para Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) memenuhi syarat-syarat pendaftaran untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Adanya program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) ini sangat membantu dan mempermudah pekerjaan dalam pelayanan pendataan TKI yang dilakukan oleh pejabat di Instansi Pemerintah Daerah dan dapat memerangi calo TKI serta program ini juga membantu masyarakat yang akan bekerja menjadi TKI untuk menerima pelayanan secara baik, cepat, murah, mudah dan efisien sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai otoritas yang menangani pendataan, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melakukan pengembangan dan percepatan pelayanan berbasis teknologi informasi secara online, yaitu berbasis Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (SISKO-TKLN) dengan tujuan mempermudah, mempercepat dan dapat menekan biaya administrasi dalam pendaftaran menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta menurut Benyamin Suprayogo

(Kepala Puslitfo BNP2TKI) mengatakan, “Sistem online untuk pelayanan TKI sangat membantu para pejabat Dinsosnakertrans di Kabupaten/Kota dalam memerangi para calo TKI dan memberantas praktek percaloan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”², sehingga dengan adanya pelayanan berbasis Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (SISKOTKLN) Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan pembangunan Nasional di sektor ketenagakerjaan melalui pembinaan, pelatihan, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang lebih baik dan lebih optimal.

Sejak tahun 2012 Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Nasional di sektor ketenagakerjaan melalui pelayanan pendataan, perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berbasis Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (SISKOTKLN). Melalui Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) Pemerintah Indonesia melakukan upaya penerapan pelayanan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam pelayanan, diantaranya pendataan, perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Luar Negeri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melibatkan unsur stakeholder dan Instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan ketenagakerjaan, salah satunya Dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan

² www.bursakerjaabdya.com/14-disnaker-kabupatenkota-ikuti-sosialisasi-dan-pelatihan-sistem-online. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2015 pukul 18.45 WIB.

fungsinya di bidang ketenagakerjaan seperti contohnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BNP2TKI menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan sistem online untuk pelayanan TKI, hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan selain itu, juga amanat dari Permenakertrans Nomor 14/Men/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, pada pasal 39 Ayat 3 yang menjelaskan sistem pendataan TKI pada Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) ini merupakan bagian dari sistem online yang diciptakan dan dikembangkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sangat membantu stakeholder dan Instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan ketenagakerjaan, salah satunya para pejabat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten/Kota dalam memerangi para calo TKI, mengurangi terjadinya manipulasi data Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta tujuan utamanya adalah untuk memastikan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut sudah terdata dan direkomendasikan melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota.

Dalam penelitian ini dilakukan penelitian terkait Analisis Implementasi Program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan pada tahun 2014 dikarenakan salah satu upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan pemberantasan percaloan dan memerangi adanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal serta program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) sangat membantu para pejabat di Dinsosnaker Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman.

Implementasi program Sistem Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) dilakukan pada studi kasus di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan dikarenakan di Kabupaten Magetan pada tahun 2014 tercatat mengalami jumlah peningkatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) sebanyak 1338 orang yang mendaftar bekerja sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI). Data Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) pada tahun 2014 tersebut bersumber dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Data Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
Kabupaten Magetan Tahun 2014

No	Negara	Tahun 2014												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Singapura	13	10	7	8	6	8	2	6	12	4	5	5	86
2	Taiwan	78	66	91	56	56	42	36	60	70	79	50	52	736
3	Hongkong	27	39	32	16	30	16	22	19	36	31	14	13	295
4	Malaysia	2	9	10	90	43	10	15	9	3	9	4	15	219
5	Brunei D	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
6	Qatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	120	124	140	170	136	76	76	94	121	123	73	85	1338

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan.

Data Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) diatas menunjukkan jumlah pendaftar Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) pada tahun 2014 berdasarkan bulan dan Negaran tujuan dengan jumlah Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) sebesar 1338 orang pada tahun 2014 yang tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan merupakan unsur stakeholder pelaksanaan program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan di tingkat Pemerintah Daerah. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan melaksanakan program pelayanan administrasi penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berbasis Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) yang dilaksanakan mulai bulan Mei tepatnya dilaksanakan pada tanggal 1 Mei tahun 2012.

Pelaksanaannya program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Instansi Pemerintahan Kabupaten Magetan melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.14/Men/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan berpedoman pelaksanaan sesuai Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: PER-26/KA/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).

Hal tersebut dikarenakan program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) merupakan program Nasional di sektor pembangunan ketenagakerjaan dari Pemerintah Pusat maka dalam pelaksanaannya di Pemerintahan Daerah berpedoman sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dan segala bentuk peraturan yang mengatur pelaksanaan program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian permasalahan diatas maka dilakukan penelitian mengenai “*Analisis Implementasi Program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan pada tahun 2014*”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) yang telah dilaksanakan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan Tahun 2014 ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) yang telah dilaksanakan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan Tahun 2014 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan Tahun 2014
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan Tahun 2014

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Dalam penelitian ini diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan dan menambah pengetahuan serta sebagai bahan pemikiran atau bahan pembanding bagi penelitian-penelitian yang selanjutnya terutama dalam penelitian terkait analisis pelaksanaan pelaksanaan program dan pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintahan Daerah.

b) Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada peneliti-peneliti yang akan datang apabila akan mengadakan penelitian yang serupa maupun yang akan melanjutkan penelitian ini yang terkait dengan analisis pelaksanaan pelaksanaan program dan pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintahan Daerah.

2. Manfaat Praktis

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang berguna dalam mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintahan Daerah yang lebih baik dan lebih optimal yang terutama bagi Pemerintahan Daerah.

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pelaksanaan program di Pemerintah Daerah dan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan di Instansi Pemerintahan Daerah.

1.5 Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel berdasarkan konsep definisi tertentu.

Menurut Koenjoroningrat pengertian teori sebagai berikut teori merupakan pernyataan mengenai adanya suatu hubungan antara gejala yang diteliti dalam satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.³

Dalam penelitian ini mempergunakan dasar-dasar teori sebagai pedoman penelitian ini, sebagai berikut :

1.5.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan dan sasaran untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat atau masalah publik. Kebijakan publik yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik harus mampu memberikan dampak bagi masyarakat sehingga keberhasilan kebijakan publik dapat diketahui pelaksanaan. Kebijakan pemerintah salah satunya dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan baik pada tingkat nasional dan tingkat daerah.

Menurut Anderson menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah

³ Koenjoroningrat. 1991. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia. Hlm 11.

sebagai berikut:⁴ (1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah, (3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan, (4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu dan (5) kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Menurut Chandler dan Plano menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas⁵.

Tujuan dari kebijakan publik yang telah rencanakan dan formulasikan oleh pemerintah baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah dapat direalisasikan melalui pelaksanaan kebijakan atau implementasi kebijakan yang didalamnya terdapat berbagai bentuk

⁴ Drs. AG. Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

⁵ Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2003. "*Teori dan Konsep Kebijakan Publik*" (dalam *Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*). Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI.

program-program pemerintah dengan tujuan dan sasaran mengatasi permasalahan publik.

Salah satu proses kebijakan publik memiliki kerangka kerja dalam menentukan kebijakan publik. Kerangka kerja kebijakan publik menurut Drs. AG. Subarsono menjelaskan bahwa kerangka kerja kebijakan ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut :⁶

1) Tujuan yang ingin dicapai.

Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya.

2) Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.

Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibandingkan dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai

3) Sumber daya yang mendukung kebijakan.

Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material dan infrastruktur lainnya.

⁶ Drs. AG. Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- 4) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.

Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.

- 5) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.

- 6) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan memengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top-down approach* atau *bottom-up approach*, otoriter atau demokratis.

Proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan. Menurut Michael Howlet dan M. Ramesh menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :⁷

- 1) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapatkan perhatian dari Pemerintah.

⁷ *Ibid*, Hlm 13.

- 2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh Pemerintah.
- 3) Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika Pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- 4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- 5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Dari proses kebijakan publik yang terdiri dari lima tahapan di atas merupakan tahapan dalam mewujudkan kebijakan publik menjadi kenyataan untuk mengatasi permasalahan publik dan dapat mencapai hasil kebijakan sesuai tujuan dan sasaran kebijakan publik.

1.5.2 Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan atau implementasi kebijakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan dari implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan pada hakikatnya berlangsung melalui perubahan-perubahan yang terjadi setelah kebijakan/program dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan pelaksanaan dan penerapan yang tersusun secara terperinci dan sistematis yang telah dilakukan oleh pelaksana dan instansi yang bertanggung jawab pada

kebijakan/program yang ditetapkan dengan harapan dapat mencapai tujuan dan sasaran suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan/program menurut teori Jones (1987): “Those Activities directed toward putting a program into effect” (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan pengertian implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip dalam Wahab, 2005:65, bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam prakteknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan dibawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Dalam kenyataan yang terjadi saat ini, implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebutuhan dasar serta implementasi kebijakan yang dilaksanakan melibatkan instansi yang bertanggung

jawab untuk kebijakan tersebut. Proses pelaksanaan kebijakan terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :⁸

- 1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- 2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- 3) Ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- 4) Dampak nyata keputusan yang baik yang dihendaki maupun tidak.
- 5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- 6) Upaya Perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan dalam proses implementasi suatu kebijakan sebagai berikut :⁹

- 1) Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
- 2) Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
- 3) Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Oleh karena itu, proses implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang tersusun secara sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi dalam menjalankan kebijakan/program dengan adanya pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat sehingga dapat berjalan lebih

⁸ Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta.

⁹ *Ibid*, Hlm 17

baik dan optimal. Proses implementasi kebijakan baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan.

1.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Salah satu teori dari George C. Edwards III (1980) menjelaskan ada beberapa variabel atau faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan guna menentukan untuk keberhasilan implementasi, menurut pandangan Edwards III ada empat variabel yang masing-masing saling berhubungan satu sama lain, yaitu sebagai berikut :¹⁰

1) Komunikasi

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang

¹⁰ Drs. AG. Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

bersangkutan. Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan adalah sebagai berikut :

a) Transmisi

Untuk mendukung implementasi kebijakan sangat diperlukan transmisi atau penyaluran ide atau gagasan dalam keputusan yang akan dilaksanakan. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

b) Konsistensi

Implementasi kebijakan dalam pelaksanaan harus dilakukan dengan jelas dan konsisten sehingga hasil capaian tujuan dan sasaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

c) Kejelasan (Clarity)

Implementasi kebijakan harus jelas tujuan dan sasaran serta didukung oleh petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan yang mempunyai kejelasan dalam penerapannya sehingga dapat diterima dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

2) Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni sumber daya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor yang penting

untuk implementasi kebijakan agar berjalan efektif, tanpa sumber daya implementasi kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti : komitmen, kejujuran, komunikatif dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Menurut Van Meter dan Van Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi adalah sebagai berikut :¹¹

1) Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen pelaksana.

2) Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non manusia (*non-human resources*).

3) Hubungan Antar Organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4) Karakteristik Agen Pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

¹¹ *Ibid*, Hlm 19

5) Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Se jauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6) Disposisi Implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni sebagai berikut :

- a) Respons implementor terhadap kebijakan yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan,
- b) Kognisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan,
- c) Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

1.5.4 Program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN)

Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) adalah sistem pendataan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat keluar negeri dan sistem online pelayanan administrasi penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta pelayanan penerbitan kartu identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selain itu,

berdasarkan amanat dari Permenakertrans Nomor 14/Men/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, pada pasal 39 Ayat 3 yang menjelaskan sistem pendataan TKI pada Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) ini merupakan bagian dari sistem online yang diciptakan dan dikembangkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) mengintegrasikan pemangku kepentingan terkait dengan penempatan TKI yang antara lain Dinas Kabupaten/Kota, PPTKIS, Balai Latihan Kerja Luar Negeri, Sarana Kesehatan, Asuransi, Pemetiksaan Psikologi, Lembaga Uji Kompetensi, Lembaga Keuangan, dan Perwakilan RI di luar Negeri.

Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) memanfaatkan teknologi terkini dalam proses implementasinya. Penggunaan Teknologi Biometrik (Teknologi yang memanfaatkan identitas individu baik secara fisiologis, sehingga dapat pengendalian dan pengawasan untuk dijadikan akses ke sebuah sistem melalui teknik pengenalan pola fisik, seperti wajah, iris mata, tanda tangan, sidik jari, garis telapak tangan dan pengenalan suara)¹² untuk memastikan TKI menghadiri pelatihan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri dan durasi yang sesuai dengan negara yang bersangkutan. Hasil akhir dari Sistem

¹² Putra Darma, 2009. *Konsep Dasar, Teknik Analisis Citra dan Tahapan Membangun Aplikasi Sistem Biometrika*. Yogyakarta : Andi Publisher.

Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) adalah KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) yang menjadi identitas TKI di luar negeri.

KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) merupakan kartu identitas bagi TKI dan sekaligus sebagai bukti bahwa TKI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur untuk bekerja ke luar negeri dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan baik pada masa penempatan (selama bekerja di luar negeri) maupun pasca penempatan (setelah selesai kontrak dan pulang ke tanah air). KTKLN ini berbentuk smartcard chip microprocessor contactless dan menyimpan data digital TKI yang dapat di update dan dibaca card reader.

1.5.5 Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Pengertian Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹³

Sedangkan pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.¹⁴

1.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan merujuk pada teori George C. Edwards III (1980 dalam Subarsono, 2013:90). George C. Edwards III menjelaskan bahwa ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi dan (4) Struktur Birokrasi. Keempat variabel tersebut juga menjelaskan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

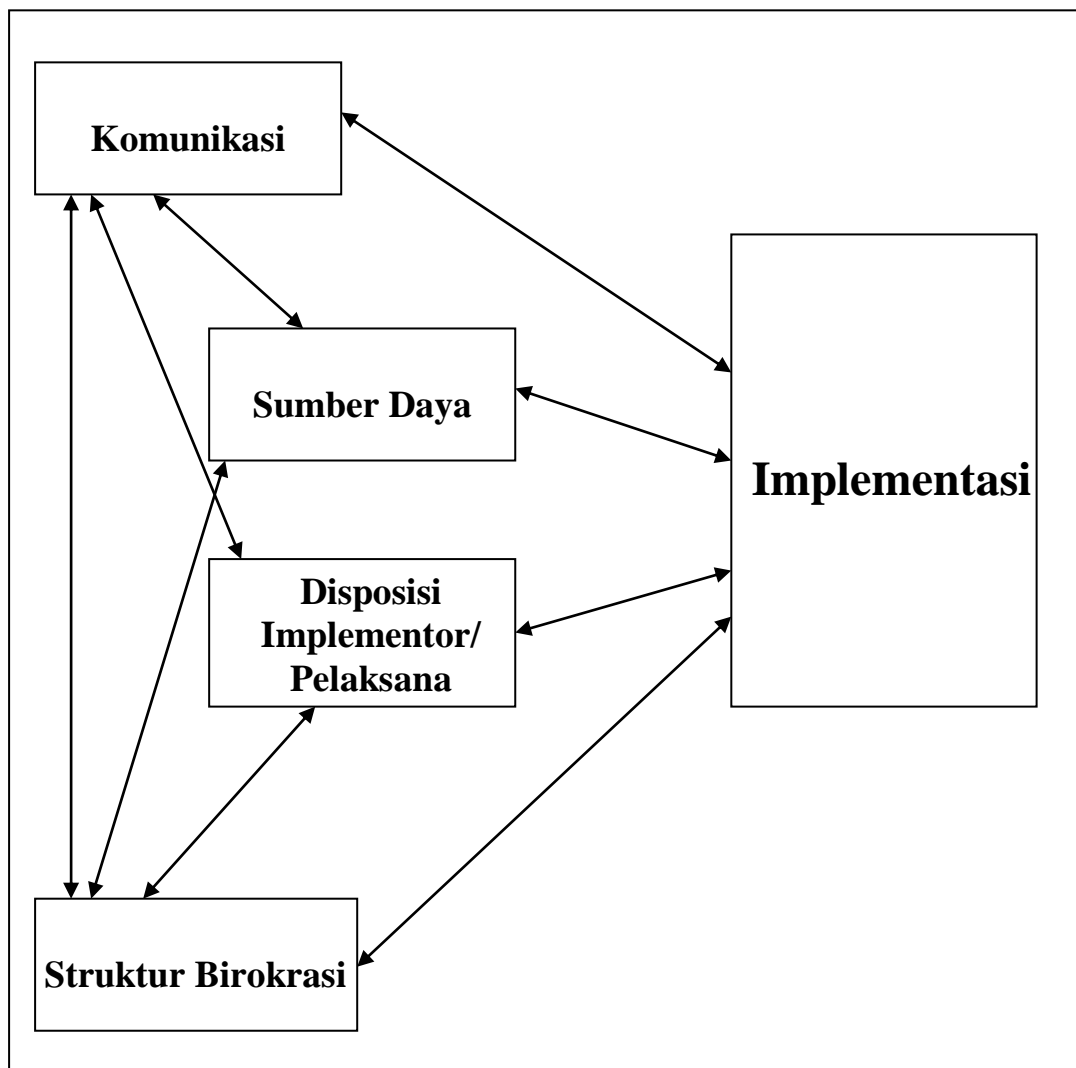
Berdasarkan teori Edwards III tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan implementasi kebijakan dapat diketahui variabel atau faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu empat variabel sebagai berikut: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi dan (4) Struktur Birokrasi. Bahwasanya keempat variabel atau faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga untuk mencapai keberhasilan implementasi perlu dilaksanakan dengan penuh sinergi dan intensif serta implementasi kebijakan yang dijalankan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sehingga pada

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

penelitian ini mengambil teori dari Edwards III yang menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Berikut ini merupakan gambar dari Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan menurut George Edwards III (1980), dapat dilihat dibawah ini :

Gambar 1.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Menurut Edwards III

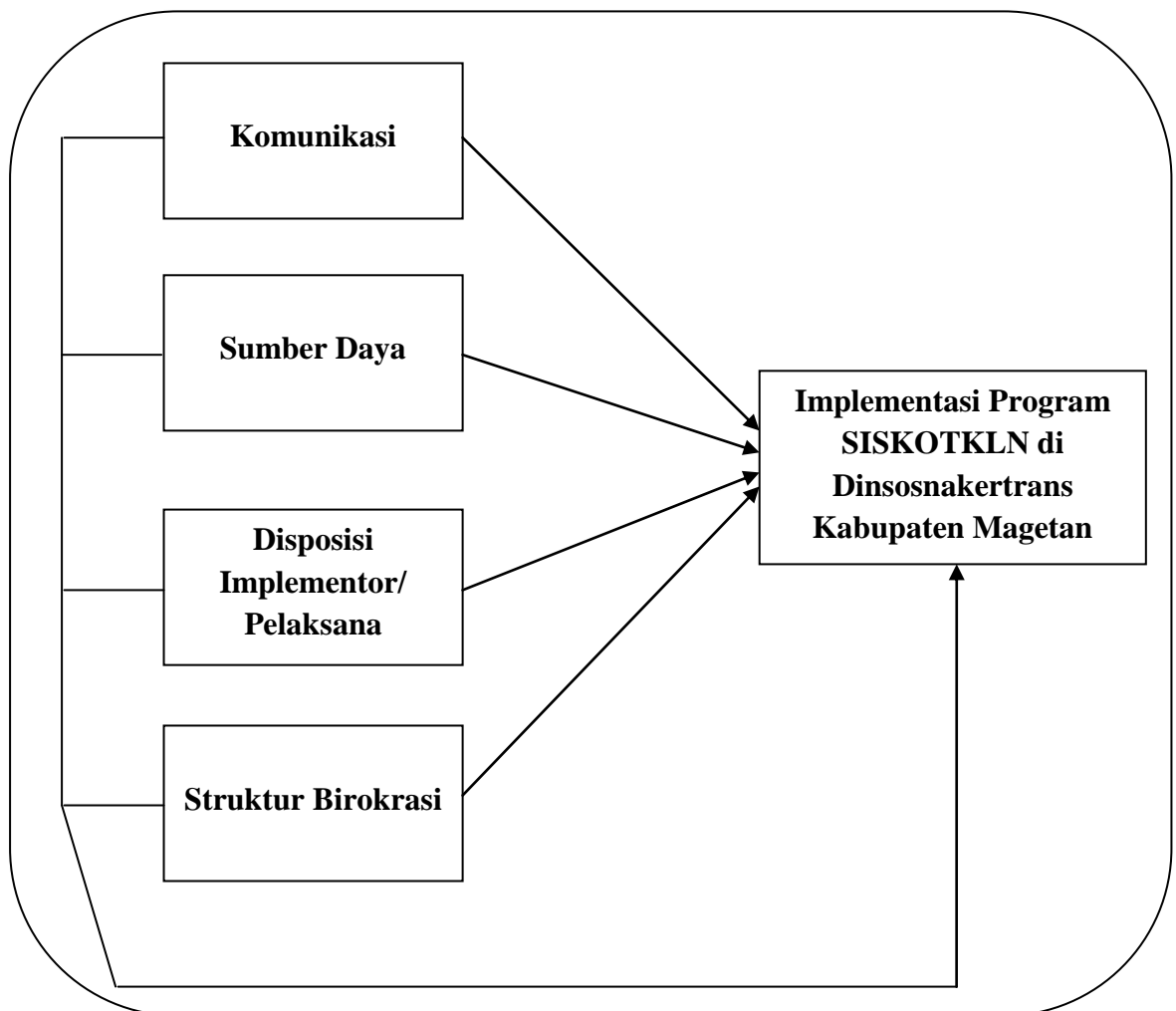


Sumber : Teori George C. Edwards III (dalam buku Drs. AG. Subarsono, 2013)

Sedangkan gambar dari analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan Tahun 2014 berdasarkan dari model teori George Edwards III (1980) adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2

**Kerangka Penelitian Analisis Implementasi Program Sistem
Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri di Dinsosnakertrans
Kabupaten Magetan Tahun 2014**



Penelitian ini melakukan analisis implementasi program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan Tahun 2014. Berdasarkan variabel atau faktor ini akan mengidentifikasi sejauhmana implementasi program yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan pelayanan terkait Tenaga Kerja Indonesia berbasis sistem teknologi informasi. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor penentu implementasi kebijakan seperti yang telah dijelaskan diatas berdasarkan teori George Edwards III (1980), seperti faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sabagai berikut: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi Implementor/Pelaksana dan (4) Struktur Birokrasi.

1.7 Definisi Konseptional

1) Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan dan sasaran untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat atau masalah publik. Kebijakan publik yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik harus mampu memberikan dampak bagi masyarakat sehingga keberhasilan kebijakan publik dapat diketahui pelaksanaan.

2) Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan merupakan suatu tindakan pelaksanaan dan penerapan yang tersusun secara terperinci dan sistematis yang telah dilakukan oleh pelaksana dan instansi yang bertanggung jawab pada suatu kebijakan ditetapkan dengan harapan dapat mencapai tujuan dan sasaran suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

3) Program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN)

Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) adalah sistem pendataan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat ke Luar Negeri dan sistem online pelayanan administrasi penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pelayanan penerbitan kartu identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

4) Tenaga Kerja Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

1.8 Definisi Operasional

- 1) Implementasi Program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO-TKLN) meliputi beberapa pelayanan sebagai berikut :
 - a) Pendataan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
 1. Pendataan dan pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia dapat berjalan lebih baik, mudah, cepat, efektif dan efisien.
 2. Pendataan Calon Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia dengan berbasis sistem teknologi informasi dapat memberantas praktek pencaloan TKI.
 - b) Pendidikan dan Pelatihan kerja Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
 1. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia dapat berjalan dengan baik, mudah dan lebih optimal.
 2. Pendidikan dan pelatihan kerja Tenaga Kerja Indonesia dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian bagi Tenaga Kerja Indonesia.
 - c) Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
 1. Tersedianya pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri secara baik, cepat, mudah dan efisien sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku berbasis sistem teknologi informasi

2. Tersedianya database penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri yang dapat diakses dimana saja secara online dan real time.
- d) Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
1. Perlindungan yang diberikan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri dapat berjalan lebih baik dan lebih optimal.
 2. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dapat mempermudah dalam pemeriksaan dan pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
- e) Penerbitan Kartu identitas bagi TKI atau Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
1. Penerbitan kartu identitas bagi TKI atau Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) merupakan hasil akhir dari pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).
 2. Tersediaanya pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) secara online di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mudah.

2) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) mencakup sebagai berikut :

a) Komunikasi :

- 1) Komunikasi yang dilakukan antar pejabat pelaksana program dalam mendukung pelaksanaan program sehingga dapat telaksana.
- 2) Kejelasan adanya aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan program yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk informasi.
- 3) Koordinasi antar stakeholder atau Instansi Pemerintah yang terkait implementasi program untuk melaksanakan program sesuai tujuan dan sasaran program.

b) Sumber Daya :

- 1) Tersedianya sumber-sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan/program, yaitu seperti :
 - a) Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi implementor atau pelaksana kebijakan/program.
 - b) Sumber daya finansial atau dana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan program.
 - c) Sumber informasi terkait pedoman pelaksanaan program.
 - d) Sumber daya peralatan dan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan program.

c) Disposisi Implementor/Pelaksana

- 1) Pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh pejabat pelaksana untuk melaksanakan program.
- 2) Tanggung jawab dan komitmen dari pejabat pelaksana untuk melaksanakan program.
- 3) Sikap kesiapan pejabat pelaksana untuk mematuhi aturan sesuai dengan aturan pelaksanaan program.

d) Struktur Birokrasi

- 1) Struktur birokrasi harus memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan untuk pembuatan *standart operation procedur* (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor/pejabat pelaksana dalam bertindak.
- 2) Kejelasan struktur birokrasi Pemerintah sebagai penanggung jawab pelaksanaan program.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah suatu metode yang dapat digambarkan secara sistematis mengenai suatu keadaan, situasi dan fenomena yang telah terjadi. Dengan kata deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitannya antara variabel-variabel yang ada.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan analisis kualitatif dengan melakukan penelitian terhadap pelayanan Tenaga Kerja Indonesia yang dilaksanakan sebelum adanya pelayanan sistem online berbasis teknologi informasi dengan pelayanan yang sudah mempergunakan sistem online berbasis teknologi informasi. Jadi penelitian melakukan analisis data before-after yaitu untuk menggambarkan keadaan berdasarkan kondisi awal dan kondisi akhir dalam pelaksanaan pelayanan sistem online Tenaga Kerja Indonesia yang berbasis teknologi informasi atau Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur.

1.9.3 Unit Analisis Data

Berdasarkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka unit analisis adalah implementasi program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan serta masyarakat yang berkerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau yang mempergunakan pelayanan program tersebut.

1.9.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder :

a) Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian, dimana data tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini melalui hasil wawancara dan observasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan.

b) Data sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu menggunakan studi pustaka, mengumpulkan buku, arsip dan dokumentasi

lainnya dari Instansi yang bersangkutan untuk dijadikan sumber data dalam penelitian ini.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada pejabat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan program Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Kabupaten Magetan.

Dalam melakukan wawancara terdapat beberapa pihak yang telah diwawancarai antara lain :

- 1) Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja : Bapak Drs Suhud, MM.
- 2) Kepala Seksi (Kasi) Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja : Bapak Agung Budiarto, S.Sos.
- 3) Staf Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja : Bapak Himawan Kristianto, S.IP.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, arsip dan laporan-laporan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program Sistem Komputerisasi

Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan, sehingga dapat dijadikan sumber data yang diperlukan pada penelitian ini.

Dalam penelitian terdapat data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen tertulis antara lain :

- 1) Buku Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN)
- 2) Laporan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berbasis sistem informasi (SISKOTKLN)
- 3) Buku Data Dasar Kabupaten Magetan (Basic Data of Magetan Regency) Tahun 2015.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian adalah menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana bentuk analisis yang dilakukan dengan menggambarkan dan menganalisa data untuk dapat memberikan informasi dan dapat memberikan pemahaman terkait pokok permasalahan secara rinci dan sistematis. Analisis kualitatif akan diperoleh data kualitatif melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Selain itu, dalam penelitian menggunakan analisis kualitatif disertai pada analisis data before-after, yaitu dimana penelitian ini melakukan analisis untuk menggambarkan keadaan berdasarkan kondisi awal dan kondisi akhir sebelum dan sesudah pelaksanaan pelayanan sistem online

Tenaga Kerja Indonesia yang berbasis teknologi informasi serta pada analisis data before-after dapat juga diketahui dampak perubahan apa sajakah yang terjadi sebelum dan sesudah adanya pelaksanaan pelayanan sistem online Tenaga Kerja Indonesia yang berbasis teknologi informasi atau Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan sehingga dapat memberikan informasi-informasi yang dapat mendukung pada penelitian ini.

Adapun tahap-tahap teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

a) Reduksi Data

Reduksi adalah proses menyeleksi, menganalisa, memfokuskan, menyederhanakan dan memilah data untuk dijadikan rangkuman data. Data-data dari lapangan akan dirangkum menjadi laporan-laporan yang informasi-informasi yang relevan atau informasi terkait pokok permasalahan sehingga dapat mendukung dalam melakukan penelitian.

b) Penyajian Data

Penyajian data dapat diartikan sebagai pengorganisasian data berisikan informasi dari lapangan yang telah tersusun dari hasil reduksi data. Selanjutnya hasil data penelitian akan diolah menjadi laporan secara sistematis dan terperinci agar dapat menjadi uraian-uraian yang menggambarkan dan

mendesripsikan sesuai dengan kejadian dan fenomena yang telah terjadi sehingga data lebih mudah dipahami.

c) Pengambilan atau Penarikan Kesimpulan

Pengambilan atau Penarikan Kesimpulan merupakan proses menganalisis dan menggabungkan informasi-informasi yang telah terorganisir secara terperinci untuk dapat dijadikan menjadi kesimpulan dengan tetap mengacu pada pokok permasalahan penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini dapat mempermudah proses pengambilan dan penarikan kesimpulan sehingga dapat menjawab pokok permasalahan penelitian dan dapat mencapai tujuan penelitian secara baik dan benar.